



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERCEPATAN AUDIT KUALITAS INFRASTRUKTUR PESANTREN SETELAH AMBRUKNYA PONPES DI SITUBONDO

Brigita Diaz Primadita
Analisis Legislatif Ahli Pertama
brigita.primadita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat proses audit kualitas bangunan pesantren yang tersebar di Indonesia. Hal ini dilakukan guna merespons kejadian ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiah Syafi'iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani, Kecamatan Besuki, Situbondo pada tanggal 29 Oktober 2025. Atap asrama putri ambruk dan menyebabkan satu korban jiwa dan 14 orang luka. Insiden ini hanya berselang sebulan dengan ambruknya bangunan tiga lantai asrama putra dan mengakibatkan kematian 63 santri di Ponpes Al-Khoziny Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Percepatan pemeriksaan infrastruktur ditargetkan pada ponpes yang sedang melakukan pembangunan. Bangunan pesantren yang dinilai memiliki risiko tinggi adalah bangunan berumur lebih dari 100 tahun, berlantai empat atau lebih, menampung lebih dari 1.000 santri, serta berencana menambah bangunan baru pada infrastruktur lama. Per tanggal 30 Oktober 2025, sudah diidentifikasi 80 ponpes oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Pemeriksaan mencakup keandalan struktur, sistem keamanan, serta kelayakan fungsi bangunan. Pemerintah sudah mengalokasikan Rp25 miliar untuk audit 80 ponpes tersebut.

Selain melakukan percepatan audit, Kementerian PU juga berkoordinasi lintas kementerian untuk memperluas sosialisasi pentingnya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dari total sekitar 42.000 ponpes di Indonesia, hanya 51 ponpes yang sudah mengantongi izin PBG. PBG adalah izin resmi dari pemerintah untuk membangun, merenovasi, memelihara, atau mengubah bangunan. Perubahan ini menekankan aspek teknis kelayakan bangunan, seperti struktur, keselamatan, dan fungsi bangunan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai regulasi yang berlaku, setiap bangunan, termasuk ponpes, wajib memiliki izin PBG.

Kementerian PU juga membuka saluran siaga atau *hotline* dan WhatsApp *Center* khusus untuk melayani konsultasi keandalan bangunan dan PBG. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lembaga sosial dan pendidikan seperti ponpes, panti asuhan, sekolah dan yayasan yang kurang mampu. Fasilitas konsultasi dan asesmen keandalan bangunan gratis diberikan untuk dua kategori, yakni keandalan bangunan sederhana (luas kurang dari 500 meter persegi dan maksimal dua lantai) dan bangunan tak sederhana (luas lebih dari 500 meter persegi dan di atas dua lantai).

Di samping itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi para santri untuk memperoleh keahlian dasar di bidang konstruksi dan teknik sipil melalui Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan disiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar dengan target program 25.000 santri di 10 provinsi. Diharapkan, ketika ada kegiatan pembangunan di lingkungan ponpes masing-masing, para santri yang turut berperan dalam proses pembangunan memiliki bekal keterampilan dasar bangunan maupun keselamatan kerja konstruksi.

Dalam merespon insiden ambruknya infrastruktur lembaga sosial dan pendidikan seperti ponpes, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. *Pertama*, audit yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh pada seluruh infrastruktur lembaga, bukan hanya pada ponpes yang mengalami insiden. *Kedua*, harus diterapkan standar teknis konstruksi yang ketat untuk bangunan baru dan yang sudah ada, dengan pengawasan pengajuan izin PBG yang disertai dengan skema bantuan bagi ponpes yang tidak mampu memperbaiki bangunannya agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. *Ketiga*, diperlukan penguatan mitigasi bencana dan sistem kesiapsiagaan, serta penegakan transparansi dan akuntabilitas bagi pihak yang lalai terhadap keselamatan. *Terakhir*, prioritas pada pembaruan database nasional ponpes agar pengawasan, bantuan, dan evaluasi keselamatan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Kementerian PU mempercepat proses audit kualitas bangunan pesantren yang tersebar di Indonesia, guna merespons kejadian ambruknya pondok pesantren di Situbondo dan Sidoarjo. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan dengan mendorong pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh dan menerapkan standar teknis konstruksi yang ketat dengan pengawasan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejak dari perencanaan. Pemerintah juga perlu menyiapkan sistem data yang memadai dan skema bantuan bagi ponpes yang tidak mampu memperbaiki bangunannya. Selain itu, pemerintah wajib memastikan transparansi dan akuntabilitas bagi pihak yang lalai terhadap keselamatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan, seperti pesantren aman dan berdaya tahan bagi pembangunan bangsa jangka panjang.

Sumber

ciptakaryapu.go.id, 30 Oktober 2025;
finance.detik.com, 29 Oktober 2025;
kompas.id, 29 Oktober 2025;
tempo.co, 29 Oktober 2025;
timesindonesia.co.id, 29 Oktober 2025; dan
voi.id, 29 Oktober 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*